



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KESIAPAN INFRASTRUKTUR 200 SEKOLAH RAKYAT

Brigita Diaz Primadita
Analisis Legislatif Ahli Pertama
brigita.primadita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dukungan pengembangan infrastruktur pendidikan melalui program Sekolah Rakyat (SR) merupakan implementasi langsung dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita mencapai Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkannya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan konstruksi 200 SR di seluruh wilayah Indonesia yang terbagi dalam 2 (dua) tahapan. Di tahap pertama, Kementerian PU akan melakukan revitalisasi 65 unit bangunan lama dan siap diresmikan sesuai dengan target pada Juli 2025. Sedangkan di tahap kedua, akan dilakukan pembangunan sekolah di 135 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kementerian PU telah melakukan survei area lahan dan menargetkan SR tahap kedua akan rampung pada Juli 2026.

Pada 7 Mei 2025, Komisi V DPR RI menyetujui tambahan anggaran Kementerian PU tahun 2025 dari Rp50,48 triliun menjadi Rp73,76 triliun. Menteri PU, Dody Hanggodo, menyebutkan penambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada pembangunan SR sesuai surat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Program SR bertujuan memberikan akses belajar yang inklusif dan berkualitas, terutama bagi daerah yang kurang terjangkau layanan pendidikan formal. SR diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), melalui penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas, dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pendanaan pembangunan 100 SR bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga membuka kesempatan swasta untuk berpartisipasi atas pembangunan program 100 SR lainnya. Pembangunan akan dimulai pada tahun 2026, melalui skema penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya untuk mempercepat proses pelaksanaan. BUMN Karya dapat menjalin kerja sama dengan kontraktor lokal untuk membangun proyek ini. Dalam proyeksi desain, satu unit SR diperkirakan memerlukan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk sekolah dengan luas sekitar 5,5 hingga 6 hektare. Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Maulidya Junica, menyebutkan kebutuhan anggaran untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur strategis tahun 2026 sebesar Rp32 triliun dengan rincian pembangunan untuk SR Rp25,8 triliun, madrasah Rp3,5 triliun, serta pasar, olahraga, pendidikan tinggi lainnya Rp3 triliun.

Kementerian PU, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Sosial berkoordinasi untuk menentukan lokasi pembangunan SR tahap selanjutnya. Adapun kriteria pemilihan lokasi berdasarkan tingkat kemiskinan wilayah yakni daerah desil 1 (tingkat kesejahteraan rumah tangga kurang dari 10 persen) dan desil 2 (tingkat kesejahteraan rumah tangga 10 hingga 20 persen), serta ketersediaan lahan.

Menteri PU mengimbau pemerintah daerah segera mengajukan proposal pembangunan SR kepada pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mempersiapkan

lahan seluas 5-8 hektare. Luas lahan menyesuaikan konsep desain yang dibuat oleh Kementerian PU dan masukan presiden untuk penambahan fasilitas pendukung seperti asrama tempat tinggal siswa, tempat ibadah, hingga pengadaan sarana prasarana untuk keluarga siswa miskin ekstrem. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menghindari kasus seperti pembongkaran Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pajajaran di Kompleks Sentra Wyata Guna, Kota Bandung. Belum adanya pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung pengalihfungsian SLB menjadi SR kepada Pemerintah Kota Bandung mengindikasikan masih kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam mempersiapkan infrastruktur SR, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, transparansi, akuntabilitas, dan kesinambungan pendanaan pembangunan terutama dengan adanya rencana kolaborasi dengan swasta dan penunjukkan langsung BUMN Karya, di mana BUMN Karya dapat menjalin kerja sama dengan kontraktor lokal. *Kedua*, masih banyaknya bangunan sekolah umum yang beroperasi namun tidak cukup layak untuk digunakan. *Ketiga*, pemerintah daerah harus berperan aktif untuk mengajukan lokasi pembangunan SR dan memenuhi kriteria SR seperti luas lahan.

Atensi DPR

Pemerintah menargetkan pembangunan konstruksi 200 SR bersumber dari APBN dan partisipasi swasta. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan revitalisasi 65 bangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap pertama dengan target diresmikan pada Juli 2025. Sedangkan pada tahap kedua, Kementerian PU menyiapkan anggaran tahun 2026 sebesar Rp25,8 triliun untuk membangun 135 SR. Komisi V DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan pembangunan konstruksi serta pengelolaan anggaran dalam pembangunan dan revitalisasi infrastruktur SR. Selain itu, Komisi V DPR RI juga perlu mendorong Kementerian PU untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta pemerintah daerah untuk mendata dan memperbaiki sekolah umum yang beroperasi namun tidak dalam kondisi layak, serta dalam pengajuan lokasi pembangunan SR yang memenuhi kriteria, sehingga penentuan lokasi SR dapat berjalan cepat dan akurat.

Sumber

ekonomi.bisnis.com, 12 Mei 2025;
investor.id, 15 Mei 2025;
mediaindonesia.com, 9 Mei 2025; dan
menpan.go.id, 15 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making